

**PERKEMBANGAN PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS
SEBAGAI SENTRA TUNA DI WILAYAH INDONESIA BAGIAN BARAT
(2006-2015)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Pendidikan*

Oleh:

FRIZKA PRIYONA

NIM/TM. 1201724/2012

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH

JURUSAN SEJARAH

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2016

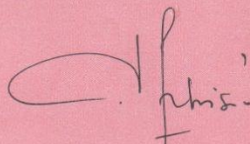
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Perkembangan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus
Sebagai Sentra Tuna di Wilayah Indonesia Bagian Barat
(2006-2015)
Nama : Frizka Priyona
BP/NIM : 2012/1201724
Program Studi : Pendidikan Sejarah
Jurusan : Sejarah
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Agustus 2016

Disetujui Oleh :

Pembimbing I



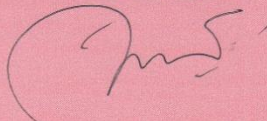
Azmi Fitrisia, M. Hum, Ph.D
NIP. 19710308199702 2 001

Pembimbing II



Drs. Etmi Hardi, M. Hum
NIP. 19670304 199303 1 003

Ketua Jurusan Sejarah



Dr. Erniwati, SS, M. Hum
NIP. 19710406 199802 2 001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus Setelah dipertahankan di Depan Penguji Skripsi

Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

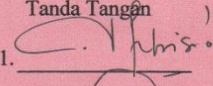
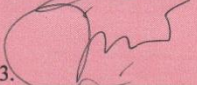
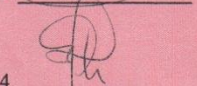
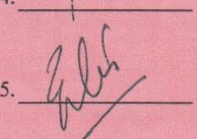
Pada Hari Rabu, 03 Agustus 2016

PERKEMBANGAN PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS SEBAGAI SENTRA TUNA DI WILAYAH INDONESIA BAGIAN BARAT (2006-2015)

Nama : Frizka Priyona
BP/NIM : 2012/1201724
Program Studi : Pendidikan Sejarah
Jurusan : Sejarah
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Agustus 2016

TIM PENGUJI

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Azmi Fitriasia, M. Hum, Ph.D	1. 
Sekretaris	: Drs. Etmi Hardi, M. Hum	2. 
Anggota	: 1. Dr. Erniwati, M.Hum	3. 
	: 2. Drs. Zul Asri, M. Hum	4. 
	: 3. Drs. Gusraredi	5. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

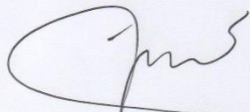
Nama : Frizka Priyona
Bp/Nim : 2012/1201724
Program Studi : Pendidikan Sejarah
Jurusan : Sejarah
Fakultas : Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: "Perkembangan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Sebagai Sentra Tuna di Wilayah Indonesia Bagian Barat (2006-2015)" adalah benar karya saya sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat, maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukum sesuai dengan hukum yang berlaku, baik di institusi Universitas Negeri Padang maupun di masyarakat dan Negara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, Agustus 2016

Diketahui oleh:
Ketua Jurusan Sejarah



Dr. Erniwati, SS, M.Hum
NIP. 19710406 199802 2 001

Yang Menyatakan



Frizka Priyona
NIM. 1201724

ABSTRAK

Frizka Priyona. 2016. “Perkembangan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Sebagai Sentra Tuna di Wilayah Indonesia Bagian Barat (2006-2015)”. Skripsi. Padang : Program Studi Pendidikan Sejarah. Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Padang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perkembangan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (PPS Bungus) sebagai sentra tuna di wilayah Indonesia bagian barat (2006-2015). PPS Bungus merupakan salah satu pelabuhan perikanan yang sangat penting karena mempunyai letak geografis yang strategis, yakni di Pantai Barat Pulau Sumatera. Hal ini, sangat menguntungkan terhadap kegiatan ekspor perikanan. Begitu pula potensi perikanan musim yang reatif sangat besar mencapai 915.000 km per segi dengan potensi tuna 124.630 ton per tahun. Pertanyaan penelitian ini, yaitu bagaimana perkembangan PPS Bungus dan implementasi penetapan PPS Bungus sebagai sentra tuna.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah, yang terdiri dari empat tahap, yakni heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Pada tahap heuristik dilakukan proses mencari dan mengumpulkan data berupa sumber tertulis dan sumber lisan yang relevan dengan topik penelitian ini. Sumber tertulis arsip, surat kabar dan buku. Sedangkan sumber lisan diperoleh melalui wawancara dengan 10 orang informan dengan kategori pimpinan sampai staf. Tahap kedua, kritik sumber, terdiri dari dua jenis yaitu eksternal dan internal untuk menguji keaslian dan kebenaran sumber. Tahap ketiga, interpretasi, yaitu menganalisis dan menghubungkan fakta-fakta yang telah diolah melalui kritik sumber. Tahap, keempat adalah historiografi atau penulisan sejarah, seluruh data yang ada ditulis berdasarkan struktur isi.

Perkembangan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus dari 2006-2015 secara umum mengalami peningkatan dari segi fasilitas fisik dan pelayanan jasa pelabuhan. Namun, dari segi investasi mengalami penurunan yang ditandai dengan vakumnya salah satu perusahaan pengolahan tuna yaitu PT Sinar Agro Utama. Khusus produksi dan kegiatan ekspor tuna sangat fluktuatif, atau berada pada grafik yang (turun-naik), penurunan produksi terjadi pada tahun 2007, 2010, 2013 dan 2015, sedangkan kenaikan produksi terjadi pada tahun 2008, 2009, 2011, 2012 dan 2014. Turun naiknya kegiatan produksi dan ekspor tuna di pengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya, yaitu: adanya praktek premanisme, kenaikan harga BBM, berkurangnya aktivitas armada kapal, keadaan alam seperti cuaca/iklim, penyebaran ikan tuna di Samudera Hindia yang belum terdeteksi dengan baik dll. Impak dari penetapan PPS Bungus sebagai sentra tuna terlihat dari perkembangan fisik PPS Bungus tetapi belum memberikan banyak kontribusi terhadap masyarakat sekitarnya.

Kata Kunci :PPS, Sentra Tuna, Wilayah Indonesia Bagian Barat

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karuniaNya yang telah memberikan kekuatan kepada penulis, sehingga telah dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ Perkembangan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Sebagai Sentra Tuna di Wilayah Indonesia Bagian Barat (2006-2015) ”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Srata Satu pada Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang (UNP).

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan dan dorongan baik moril maupun materil dari berbagai pihak. Sehingga sengan itu pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua dan kakek tercinta, yaitu Ayahanda Edi (Alm), Ibunda Mulyati dan Kakek Khasmuji atas cinta, kasih, sayang, pengorbanan dan do’a yang selalu ayah dan ibu curahkan, sehingga menjadi energy dan motivasi bagi ananda untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibuk Azmi Fitrisia M.Hum, Ph.D selaku Pembimbing I dan Bapak Drs. Etmi Hardi, M.Hum selaku Pembimbing II, yang penuh perhatian dan kesabaran dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Drs. Zul' Asri M.Hum, Dr. Gusraredi dan Ibu Dr. Erniwati M.Hum sebagai penguji yang telah memberikan sumbangan pikiran dan saran konstruktif dalam rangka kesempurnaan skripsi ini.
4. Ibuk Dr. Erniwati, M.Hum selaku Ketua Jurusan Pendidikan beserta bapak/ibu dosen serta karyawan/karyawati Jurusan Sejarah yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Pegawai-pegawai Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang telah membantu penulis dalam pencarian data selama penelitian.
6. Seluruh rekan-rekan seperjuangan mahasiswa Jurusan Sejarah BP 2012 khususnya (Desi Indriani & Ulfah Nury Batubara) dan semua pihak yang telah ikut memberikan dorongan dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga bantuan, bimbingan dan petunjuk yang Bapak/Ibuk dan rekan-rekan berikan menjadi amal dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari TYME.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan ketidak sempurnaan dalam skripsi ini sehingga kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan tulisan ini. Semoga penulisan ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Juni 2016

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah & Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian & Manfaat Penelitian	16
D. Studi Pustaka	16
1. Studi Relevan	16
2. Konseptual	19
E. Kerangka Pemikiran	26
F. Metode Penelitian	27
BAB II KEADAAN UMUM PELABUHAN BUNGUS	29
A. Sejarah Berdirinya PPS Bungus	29
B. Perencanaan PPS Bungus	33
C. Struktur Organisasi PPS Bungus	39
D. Fasilitas PPS Bungus	45
E. Keadaan Umum PPS Bungus	55
1. Kapal	55
2. Penyaluran Air Bersih	58
3. Penyaluran Es	59
4. Penyaluran BBM	61
5. Docking kapal	62
6. Penerimaan PNPB	63
BAB III PELABUHAN BUNGUS SEBAGAI SENTRA TUNA	65
A. Penetapan PPS Bungus Sebagai Sentra Tuna	65
B. Produksi & Ikan Tuna	70
C. Ekspor Tuna	76
D. Investasi	86
E. Dampak Penetapan PPS Bungus	95
BAB IV PENUTUP	97
A. Kesimpulan	98
B. Saran	
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN	105

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Fasilitas Pokok PPS Bungus Tahun 2015.....	47
2. Fasilitas Fungsional PPS Bungus Tahun 2015	51
3. Fasilitas Penunjang PPS Bungus Tahun 2015	54
4. Kunjungan Kapal di PPS Bungus 2006-2015	57
5. Penyaluran Air Bersih di PPS Bungus Tahun 2006-2015	59
6. Penyaluran Es di PPS Bungus Tahun 2006-2015	60
7. Penyaluran BBM di PPS Bungus Tahun 2006-2015	61
8. Aktivitas Docking Kapal di PPS Bungus Tahun 2006-2015	62
9. Penerimaan PNPB di PPS Bungus Tahun 2006-2015	64
10. Produksi dan Nilai Produksi Ekspor Tuna di PPS Bungus Tahun 2006-2010	72
11. Produksi dan Nilai Produksi Ekspor Tuna di PPS Bungus Tahun 2011-2015	75
12. Produksi dan Nilai Produksi Ekspor Tuna di PPS Bungus Tahun 2006-2015	84
13. Rincian Ekspor Tuna Ke Jepang & Amerika di PPS Bungus Tahun 2012-2015	85
14. Potensi Pengembangan Usaha Perikanan Tahun 2014	90

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Layout PPS Bungus	105
2. Kawasan PPS Bungus & Kantor Administrasi PPS Bungus	106
3. Papan Informasi & wardrop PPS Bungus	107
4. Brosur	108
5. Wawancara	109

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berubahnya *landskap* politik di Indonesia, ditandai dengan munculnya era reformasi khususnya, telah memicu perubahan orientasi pembangunan di bidang kelautan dan perikanan. Pembangunan selama Orde Baru¹ yang lebih berorientasi pada pembangunan pertanian tanaman pangan, khususnya beras secara tidak langsung membuat sektor kelautan dan perikanan kurang banyak berperan. Setelah Orde Baru memerintah di Indonesia terjadi perubahan cara pandang negara terhadap sektor kelautan.

Dengan lahirnya momentum reformasi, pemerintah kini mulai mencurahkan perhatiannya untuk mengembangkan sektor kelautan dan perikanan menjadi sektor unggulan yang akan menjadi *prime mover* ekonomi, khususnya di wilayah-wilayah

¹ Pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto berlangsung sejak 1970-1998 seringkali disebut sebagai orde pembangunan. Pada masa pemerintahan Soeharto, kebijakan-kebijakan pemerintah lebih difokuskan kepada pembangunan nasional. Titik berat pembangunan diletakkan pada bidang pertanian dan industri yang mendukung pertanian. Selain itu, bidang pertambangan dan pariwisata juga diutamakan sebagai sumber penerimaan devisa. Kebijakan pemerintahan presiden Soeharto yang berorientasi daratan, menyebabkan pengalokasian segenap sumber daya pembangunan lebih diprioritaskan pada sektor-sektor daratan. Hal ini, menimbulkan dampak negatif terhadap bidang kelautan. Permasalahan utama yang dihadapi antara lain pencurian ikan, penangkapan ikan secara berlebihan (*over fishing*), degradasi habitat pesisir (mangrove, terumbu karang, padang lamun dll), konflik penggunaan ruang dan sumber daya, belum tersedianya teknologi kelautan dan perikanan secara memadai, terbatasnya sumber permodalan untuk investasi, dan kemiskinan yang masih melilit sebagian besar penduduk wilayah pesisir, khususnya budidaya ikan kecil dan nelayan kecil. Uraian lebih lanjut, lihat A. Hidayat S.H dkk. 1990. *Orde Baru Dalam Pembangunan Nasional 25 Tahun Pertama*. Jakarta. Yayasan Kesejahteraan Veteran RI.

pesisir.² Ada beberapa perubahan yang pantas dihargai selama reformasi dalam bidang maritim, meskipun terkesan masih kulit luar pembangunan maritim itu sendiri. Berikut, beberapa perubahan yang terjadi pada bidang maritim selama era reformasi dari pemerintahan Presiden Habibie sampai Presiden Jokowi.

Pertama, Presiden Habibie mendeklarasikan visi pembangunan kelautan Indonesia dalam “Deklarasi Bunaken”. Inti dari deklarasi tersebut adalah laut merupakan peluang, tantangan dan harapan untuk masa depan persatuan, kesatuan dan pembangunan bangsa Indonesia. Selanjutnya di bawah kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid, pada tahun 1999 bidang kelautan telah memperoleh perhatian lebih dari pemerintah yaitu dengan dibentuknya lembaga Departemen Eksplorasi Laut yang kemudian berubah nama menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Di samping itu juga dilakukan penyempurnaan organisasi Dewan Kelautan Nasional (DKN) menjadi Dewan Maritim Indonesia (DMI) dan saat ini menjadi Dewan Kelautan Indonesia. Kedua lembaga tersebut diharapkan dapat menjadi lembaga yang mampu mengembangkan dan mengelola potensi sumber daya kelautan sebagai sumber devisa negara.³

Kedua Presiden Megawati Soekarno Putri memberikan ruang khusus dalam bidang maritim, yakni dibentuknya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

² Akhmad Fauzi. 2005. *Kebijakan Perikanan dan Kelautan (Isu, sintesis, Gagasan)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama Hal. 80

³ <http://Analisis> Perbandingan Kebijakan Mengenai Peraturan atau Undang-Undang yang Dikeluarkan Pemerintah Pada Pembangunan Sektor Maritim di Masa pemerintahan Soekarno, Soeharto-Habibie, Gusdur-Mega, dan SBY Ekonomi.htm Diakses pada tanggal 30 Desember 2015 Pada pukul 08:00

KKP menciptakan beberapa terobosan baru dalam bidang pengelolaan kelautan, salah satunya dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang baru, yakni Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentang perikanan.⁴ Undang-undang ini terdiri dari 17 bab dan 111 pasal. Undang-undang ini, berisi tentang aturan dalam penelitian di laut Indonesia dan Pengadilan Perikanan.⁵ Perbaikan Undang-undang perikanan belum sepenuhnya mencerahkan kehidupan maritim Indonesia karena masih terdapat masalah dengan undang-undang yang berhubungan dengan pulau-pulau Indonesia. Sampai saat ini tidak ada keputusan yang jelas tentang batas wilayah RI dengan Singapura, Philipina, dan Australia.⁶

Selain itu, Presiden Megawati juga melakukan pendataan ulang jumlah pulau-pulau yang dimiliki Indonesia, ternyata hasilnya luar biasa Indonesia memiliki 18.110 pulau.⁷ Kemudian, Presiden Megawati Soekarno Putri juga menetapkan tanggal 13 Desember sebagai Hari Nusantara berdasarkan Kepres No. 126 Tahun 2001 tentang Hari Nusantara, serta mengeluarkan “Seruan Sunda Kelapa” yang menyatakan penerapan asas *cabotage* sebagai suatu keharusan. Penerapan asas *cabotage* adalah kebijakan fundamental bagi pembangunan industri maritim nasional.⁸ Seruan Sunda

⁴ Biro Hukum dan Organisasi Departemen Kelautan dan Perikanan.2004. *Undang - Undang No 31 tahun 2004*. Jakarta: Departemen Kelautan dan Perikanan. Diakses 13 Januari 2016.

⁵“Susah Menangkap, Menahan Juga Beresiko”. Dalam *Surat Kabar Kompas* 13 Januari 2003.

⁶ <http://Analisis> Perbandingan Kebijakan Mengenai Peraturan atau Undang-Undang yang Dikeluarkan Pemerintah Pada Pembangunan Sektor Maritim di Masa pemerintahan Soekarno, Soeharto-Habibie, Gusdur-Mega, dan SBY Ekonomi.htm Diakses pada tanggal 30 Desember 2015 Pada pukul 08:00

⁷ “Indonesia Memiliki 18. 110 Pulau”. Dalam *Surat Kabar Media Indonesia*.

⁸“Asas *Cabotage*” adalah kegiatan angkutan laut dalam negeri dilakukan perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia serta diawaki awak kapal berkewarganegaraan Indonesia. (Pasal 8 ayat 1UU 17 Tahun 2008)

Kelapa yang dicetuskan oleh Presiden Megawati akhirnya dilanjutkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan terdapat dalam Inpres No. 5 tahun 2005 tentang Pengembangan Industri Pelayaran Nasional.

Ketiga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengganti nomenklatur Dewan Maritim Indonesia (DMI) menjadi Dewan Kelautan Indonesia (DEKIN) melalui Keppres No. 21 Tahun 2007 dan menyelenggarakan konferensi kelautan dunia atau *World Ocean Conference* (WOC) di Manado pada tanggal 11-15 Mei 2009 dengan tema “Dampak perubahan iklim terhadap laut dan dampak laut terhadap perubahan iklim”. Penyelenggaraan WOC 2009 didukung oleh 123 negara yang tergabung dalam *The Eighteenth Meeting of States Parties to the United Nations Convention on the Law of the Sea* dan dalam pelaksanaannya dihadiri oleh 423 delegasi yang berasal dari 87 negara dan organisasi-organisasi antar negara.

Selanjutnya pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Brazil yang membahas pembangunan berkelanjutan dengan mengedepankan keseimbangan antara upaya meningkatkan pertumbuhan global dan pembangunan berwawasan lingkungan. Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, menyampaikan pidato yang berjudul “*For Indonesia, Blue Economy is Our Next Frontier*”, yang bertujuan mengajak dunia untuk melaksanakan ekonomi hijau dalam pembangunan nasional dan juga mensosialisasikan ekonomi biru (*Blue Economy*)⁹ di mana laut menjadi bagian integral untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan.

⁹ Konsep Ekonomi Biru (*Blue Economy*) merupakan konsep yang menggabungkan pengembangan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Konsep Ekonomi Biru mencontoh cara kerja

Dengan demikian, secara *eksplisit* Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengarahkan konsep ekonomi biru sebagai *grand design* pembangunan kelautan nasional di masa depan.¹⁰

Keempat Presiden Joko Widodo menjadikan maritim sebagai ikon pembangunan. Hal ini dituangkan dalam konsep restorasi maritim yang terdiri atas : budi daya laut, pasar gelap tuna dan pemanfaatan perairan zona ekonomi eksklusif (ZEE), penangkapan ikan ilegal, serta padat karya sektor maritim. Konsep restorasi maritim yang baru bisa diwujudkan adalah penangkapan kapal pengangkut ikan ilegal.¹¹ Presiden Joko Widodo mengangkat Susi Pudjiastuti sebagai menteri kelautan dan perikanan. Menteri Susi berorientasi kepada perlindungan laut Indonesia terutama soal ikan. Menteri Susi telah mengeluarkan berbagai kebijakan terkait pengelolaan kelautan dan perikanan Indonesia yakni pelarangan alih muatan kapal di tengah laut, aturan moratorium kapal besar dan penenggelaman kapal ilegal.¹²

alam (ekosistem), bekerja sesuai dengan apa yang disediakan alam dengan efisien dan tidak mengurangi tapi justru memperkaya alam (*shifting from scarcity to abundance*), limbah dari yang satu menjadi makanan/sumber energi bagi yang lain, sehingga sistem kehidupan dalam ekosistem menjadi seimbang, energi didistribusikan secara efisien dan merata tanpa ekstraksi energi eksternal, bekerja menuju tingkat efisiensi lebih tinggi untuk mengalirkan nutrien dan energi tanpa meninggalkan limbah untuk mendayagunakan kemampuan seluruh kontributor dan memenuhi kebutuhan dasar bagi semuanya. Merujuk pada konsep tersebut di atas, maka Indonesia dapat mengembangkan teori tersebut ke dalam pembangunan bidang kelautan dengan model ekonomi biru sebagai penopang Pembangunan Nasional. Lihat lebih lanjut, lihat Dewan Kelautan Indonesia.2012. Kebijakan Ekonomi Kelautan dengan Model Ekonomi Biru. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan.

¹⁰ <http://Analisis> Perbandingan Kebijakan Mengenai Peraturan atau Undang-Undang yang Dikeluarkan Pemerintah Pada Pembangunan Sektor Maritim di Masa pemerintahan Soekarno, Soeharto-Habibie, Gusdur-Mega, dan SBY Ekonomi.htm Diakses pada tanggal 30 Desember 2015 Pada pukul 08:00

¹¹“*Restorasi Maritim Minus Kebijakan Strategis*”. Dalam Surat Kabar Tempo 2 November 2015.

¹² “*Pengelolaan Wilayah Laut Yang Terpadu*”. Dalam Surat Kabar Kompas 17 Juni 2015.

Setelah terjadinya perubahan orientasi pembangunan dari daratan menjadi kelautan, sektor maritim mulai mengalami perkembangan termasuk pada bidang pelabuhan yakni pelabuhan perikanan. Pelabuhan perikanan yang mengalami perkembangan yang cukup pesat diantaranya Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, Sumatera Barat.¹³

Pembangunan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus diawali dari Proyek Pembangunan dan Pengembangan Perikanan Sumatera atau lebih dikenal dengan nama *Sumatera Fisheries Development Project* (SFDP) yang dimulai sejak tahun 1981 dan selesai tahun 1989 dengan sumber dana berasal dari pinjaman Bank Pembangunan Asia (ADB Loan 474-INO) sebesar US\$ 9,3 juta dan dana pendamping setiap tahun anggaran dari APBN. Pada periode ini SFDP telah berhasil membebaskan tanah seluas 14 Ha dan membangun beberapa fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang.¹⁴

Periode berikutnya, kegiatan SFDP berakhir dan dilanjutkan oleh UPT Direktorat Jenderal Perikanan yang disebut dengan Pelabuhan Perikanan Nusantara Bungus berdasarkan SK. Mentan Nomor : 558/Kpts/OT.210/8/90 tanggal 4 Agustus 1990 (Vide Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara Nomor : B.590/I/90 tanggal 2 Juli 1990) dengan status eselon III/b.¹⁵

¹³ Yang ditetapkan oleh Presiden SBY sebagai sentra tuna di wilayah Indonesia bagian barat, pada tanggal 19 desember 2006.

¹⁴ Kementerian Kelautan Dan Perikanan (Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap). *Profil Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Sentra Tuna Indonesia Bagian Barat)*. Jakarta: Kementerian Kelautan Dan Perikanan (Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap). Hal. 3

¹⁵ Profil PPS Bungus (Sentra Tuna Indonesia Bagian Barat). *Ibid.* Hal.3

Perkembangan selanjutnya terhitung mulai 1 Mei 2001 Pelabuhan Perikanan Nusantara Bungus ditingkatkan statusnya menjadi eselon II/b dengan klasifikasi Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (PPSB) berdasarkan SK Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 26.1/MENTAN/TAHUN 2001 (Vide Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 86/M.PAN/4/2001 tanggal 4 Juli 2001).

Selain itu Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus menjadi penting karena terletak di Kelurahan Bungus Barat, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat, berjarak 16 km dari Kota Padang dan ± 30 km dari Bandara Internasional Minangkabau.¹⁶

Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus merupakan salah satu pelabuhan perikanan yang sangat penting karena mempunyai letak geografis yang sangat strategis, yakni di pertengahan Pulau Sumatera. Berada dekat dengan daerah penangkapan ikan (*fishing ground*), yang membuat mutu ikan hasil tangkapan dapat dipertahankan karena hari penangkapan (*catching day*) menjadi lebih pendek. Hal ini sangat menguntungkan untuk kegiatan ekspor perikanan yakni menghemat biaya operasional armada penangkapan ikan untuk bahan bakar dan biaya logistik lainnya, serta dapat menghemat waktu perjalanan dari saat penangkapan menuju tempat pendaratan. Sebagaimana diketahui bahwa ikan adalah produk yang sangat cepat atau

¹⁶ Profil Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Sentra Tuna Indonesia Bagian Barat).*Op.Cit.*Hal.6

mudah mengalami kemunduran mutu. Dengan demikian usaha penghematan waktu di laut adalah sangat penting.¹⁷

Tetapi pada awalnya, keuntungan tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal karena kegiatan ekspor perikanan nyatanya harus melewati rute yang panjang yakni Padang- Jakarta- Singapura- Jepang atau Amerika. Hal ini menjadi persoalan yang cukup rumit karena rute yang terlalu panjang dan jauh membuat biaya yang semakin membengkak sehingga dikhawatirkan membuat daya saingnya menurun di pasaran. Oleh karena itu, maka PPS Bungus melakukan kerjasama dengan pesawat cargo swasta untuk membuat rute baru melalui Padang- Singapura- Jepang atau Amerika yang khusus mengangkut tuna tangkapan dari Sumatra Barat. Tetapi ternyata rute ini hanya bertahan selama enam bulan saja, karena pesawat cargo ini mengalami kerugian karena tidak mempunyai muatan untuk dibawa kembali mendarat di Padang. Saat ini, pengiriman ikan tuna segar untuk tujuan ekspor negara Jepang dilakukan dengan pesawat komersil Garuda melalui rute Padang-Jakarta-Bali-Jepang. Begitu juga untuk ikan tuna ekspor produk olahan untuk tujuan ekspor Amerika tetapi melalui rute yang berbeda yakni Padang-Jakarta-Hongkong-Amerika.¹⁸

Daya tarik dari pelabuhan perikanan samudera Bungus adalah **Pertama**, PPS Bungus mempunyai letak geografis yang sangat strategis yakni berada di pantai barat

¹⁷ <http://web.ipb.ac.id> Diakses pada tanggal 14 Februari 2016, Pada pukul 15.00.

¹⁸ Wawancara dengan Erma dan dikuatkan oleh Eva, di PPS Bungus Teluk Kabung, Tanggal 26 Juli 2016

Pulau Sumatera dan berada dekat dengan daerah penangkapan ikan, sehingga mutu ikan hasil tangkapan dapat dipertahankan karena hari penangkapan (*catching day*) menjadi lebih pendek. Begitu pula potensi perikanan musim yang relatif sangat besar mencapai 915.000 km per segi dengan potensi tuna 124.630 ton per tahun. Sementara tingkat pemanfaatan baru sekitar 26,2%. **Kedua**, kondisi perairan PPS Bungus sangat tenang dan memiliki kolam pelabuhan yang sangat dalam tanpa pernah mengalami pendangkalan. **Ketiga**, investor diberi kemudahan dalam memanfaatkan lahan karena lahan telah memiliki status hukum sertifikat HPL (Hak Pengelolaan Lahan). **Keempat**, keberadaan PPS Bungus sangat strategis sehingga sangat mudah memperoleh berbagai kebutuhan melaut seperti BBM, air tawar, es, ransum, maupun logistik lainnya.¹⁹

Potensi lestari ikan tuna di sepanjang pantai barat Sumatra Barat mencapai 915.000 km per segi dengan potensi tuna 124.630 ton per tahun. Sementara tingkat pemanfaatan baru sekitar 26,2%. Artinya, potensi penangkapan tuna di perairan laut Sumbar terbilang sangat besar. Terutama untuk jenis *yellow fin tuna* dan *big eye tuna*. Potensi penangkapan *yellow fin tuna* (*Thunnus Albacores*) mencapai 23.343 ton per tahun dengan tingkat pemanfaatan baru 19,2%. Sedangkan *big eye tuna* (*Thunnus Obesus*) memiliki potensi tangkap 19.332 ton per tahun dengan pemanfaatan 19,2%.

¹⁹[http:// PPS BUNGUS.htm](http://PPS_BUNGUS.htm) Diakses pada tanggal 31 Oktober 2015 Pada pukul 11.09

Begitu juga untuk jenis *skipjack tuna* (Cakalang) dengan potensi 65.000 ton per tahun, sementara pemanfaatan baru sekitar 3.300 atau 19,1%.²⁰

Berdasarkan potensi ikan tuna yang dimiliki oleh Sumatera Barat tersebut, maka dilakukanlah perencanaan ditingkat pusat dalam program Revitalisasi Perikanan tahun 2005-2009 untuk menjadikan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus Teluk Kabung Padang, Sumatera Barat sebagai sentra Tuna Nasional. Penetapannya dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 19 Desember 2006 yang bertepatan juga dengan perayaan “Hari Nusantara”. Hal ini, merupakan langkah optimis bagi Propinsi Sumatera Barat untuk mulai membangkitkan sektor perikanan sebagai salah satu unggulan bagi pembiayaan pembangunan. Kondisi ini terutama sekali ditunjang dengan luas wilayah laut termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) lebih kurang 186.580 km² dengan panjang garis pantai 2.420.389 km.²¹

Semenjak saat itu persiapan untuk dapat mewujudkannya dilakukan secara serius, baik oleh Departemen Kelautan dan Perikanan, maupun Pemerintah Daerah Sumatera Barat. Departemen Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap melaksanakan pembangunan infrastruktur pelabuhan perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya untuk suplai umpan armada tuna yaitu ikan bandeng dan Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan untuk

²⁰ [Http://Potensi Tuna di Padang Baru Tergarap 20%25 Industri - Bisnis.com.htm](http://Potensi%20Tuna%20di%20Padang%20Baru%20Tergarap%2020%25%20Industri%20-%20Bisnis.com.htm), Diakses pada tanggal 6 Agustus 2016, Pada pukul 16.00.

²¹ Rini Sunsanti. *Analisa Perkembangan Tuna Sumatra Barat*. Tesis. Universitas Andalas: Padang: 2009. Hal. 4

peralatan pengujian mutu ikan dan sertifikasi mutu hasil perikanan. Pemerintah Daerah baik Gubernur maupun Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sumatera Barat sangat mendorong dan berupaya penuh membantu mewujudkan hal tersebut.

Gubernur Sumatera Barat bahkan telah mengeluarkan Surat Keputusan nomor : 523.5/608-DKP.5/2009 tanggal 16 Maret 2009 tentang Pembentukan Tim Pengembangan Sentra Tuna Wilayah Indonesia Bagian Barat Provinsi Sumatera Barat untuk mendorong terwujudnya Sumatera Barat sebagai sentra tuna wilayah Indonesia bagian barat. Tim ini terdiri Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi dan instansi terkait lainnya termasuk PPS Bungus. Hal ini sebagai salah satu upaya terobosan agar kendala administrasi dan teknis dalam implemetasinya dapat diatasi segera.²²

Setelah ditetapkan sebagai sentra tuna wilayah Indonesia bagian barat pada tahun 2009, PPS Bungus terus mengalami perkembangan. Pada tahun 2011 PPS Bungus kembali ditetapkan sebagai kawasan inti minapolitan di bidang perikanan tangkap.²³ Kemudian pada awal tahun 2012 PPS Bungus ditetapkan sebagai kawasan industrialisasi perikanan tangkap. Industrialisasi di PPS Bungus mengacu pada perikanan tuna, tongkol dan cakalang atau istilah terkenalnya TTC. Hal ini sangat tepat karena sebelumnya PPS Bungus telah ditetapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai kawasan sentra tuna Indonesia bagian barat.

²²[http:// Profil PPS Bungus • Berita DJPT • Ditjen Perikanan Tangkap.htm](http://ProfilPPSBungusBeritaDJPTDitjenPerikananTangkap.htm). Diakses pada tanggal 31 Oktober 2015 pada pukul 09:11.

²³ Minapolitan adalah konsep pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip : Terintegrasi, Efisiensi, Berkualitas dan Percepatan dengan “ Konsep Manajemen Ekonomi Kawasan Berbasis Kelautan dan Perikanan”.

Pantai Barat Pulau Sumatera memiliki potensi perikanan yang sangat besar, baik di perairan teritorial maupun di perairan zona ekonomi eksklusif hingga sejauh 200 mil dari pantai. Potensi yang besar tersebut membuat usaha perikanan khususnya usaha penangkapan ikan di pantai Barat Sumatera lebih besar pula dibandingkan pantai Timurnya. Hal ini terlihat dari jenis alat tangkap dan armada yang dioperasikan lebih besar dengan fishing trip yang relatif lama. Usaha penangkapan ikan yang besar tersebut terlihat pula dari adanya Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus di Padang, Sumatera Barat yang ditetapkan sebagai sentra tuna di wilayah Indonesia bagian barat dan Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga, yang berpotensi menjadi penghasil cakalang.

Sebab, dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Sibolga, setiap waktu para nelayan Tapteng dan Kota Sibolga dapat memperoleh cakalang sebagai hasil tangkapan, tanpa dibatasi musim. “Dari hasil pendataan dan pengamatan yang dilakukan, setiap waktu oleh nelayan maupun kapal penangkap ikan dari Tapteng dan Sibolga selalu mampu memperoleh cakalang di sekitar Samudera Hindia, tanpa dibatasi oleh musim. Ini menunjukkan, bahwa sebenarnya mampu menjadi sentra penghasil cakalang di Pantai Barai Sumatera ini. Berbeda dengan Sumatera Barat yang menjadi sentra tuna, para nelayan kita justru jarang yang mampu menangkap ikan tuna, tutur Kepala PPN, Sibolga, Hendry M. Batubara SPi MSi (dikutip dari Medan Bisnis). Dinas Kelutan dan Perikanan, Propinsi Sumut, mencatat hasil produksi penangkapan ikan dari kawasan perairan Samudera Hindia, masih berkisar 40% sampai 60% dari total potensi sumber daya

ikan yang ada. Dengan demikian, maka dipastikan produksi produk cakalang di kawasan itu masih sangat tinggi.²⁴ .

Selain PPS Bungus, masih ada pelabuhan samudera lainnya yang berada diluar kawasan pantai barat Sumatera yang memiliki potensi dan keunggulan tersendiri di antaranya: pertama, PPS Belawan yang menjadi salah satu sentra industrialisasi perikanan yang sangat penting di wilayah Sumatera.²⁵ Kedua, PPS Cilacap merupakan pelabuhan perikanan samudera satu-satunya di Pantai Selatan Jawa. Posisinya berhadapan langsung dengan samudera Indonesia dan dikenal mempunyai sumber daya ikan cukup melimpah terutama ikan pelagis besar dan kecil serta udang.²⁶ Ketiga, PPS Kendari merupakan basis utama perikanan laut di wilayah Sulawesi Tenggara khususnya, dan kawasan Timur Indonesia pada umumnya dengan daerah penangkapan (*fishing ground*) adalah Laut Flores, Selat Makassar, Laut Banda, Laut Arafuru dan Laut Maluku yang kaya akan sumberdaya ikan jenis pelagis.

²⁴ <http://www.pipp.djpt.kkp.go.id>, Diakses pada tanggal 8 Agustus 2016 Pada Pukul 06.00

²⁵ Menurut sejarahnya, PPSB telah mulai dibangun sejak tahun 1975 melalui “Proyek Pembinaan Kenelayanan (PK) Gabion Belawan” yang dilaksanakan oleh Departemen Perhubungan melalui Administrator Pelabuhan Utama (ADPEL) Belawan guna mengelola aktivitas perikanan di Gabion, Belawan. Karena dirasakan kurang begitu lancar maka pada tanggal 16 Januari 1978 terjadi serah terima pengelolaan PK Gabion dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Departemen Perhubungan) kepada Direktorat Jenderal Perikanan (Departemen Pertanian). Berdasarkan penyerahan tersebut maka pada tanggal 22 Mei 1978 Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan diresmikan oleh Menteri Pertanian melalui SK No. 310 tahun 1978, namun pada saat itu statusnya masih Pelabuhan Perikanan Nusantara. Pada tanggal 1 Mei 2001 statusnya berubah menjadi Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan yang sesuai dengan SK. No. 26/I/MEN/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan. PPSB telah mengalami dua kali renovasi yakni pada tahun 2002 (bantuan dari SPL-OECF) dan 2005 (dana APBN).

²⁶ Menurut Pusat Riset Perikanan Tangkap dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Oseanologi (2005), bahwa kelompok ikan pelagis besar di Perairan Samudera Hindia yang merupakan daerah fishing ground nelayan cilacap, masih berpotensi untuk dieksploitasi karena baru dimanfaatkan sebesar 188,280 ton atau 51,41% dari potensi lestari sebesar 366,260 ton pertahun. Begitu juga dengan kelompok ikan pelagis kecil baru dimanfaatkan sebesar 264,560 ton atau 50,44% dari potensi lestari sebesar 526,570 ton pertahun.

Di samping itu juga sangat potensial dengan gurita dan sotong yang telah menjadi salah satu komoditas ekspor hasil perikanan andalan Sulawesi Tenggara.²⁷ Keempat, Pelabuhan Perikanan Samudra Nizam Zachman Jakarta yang merupakan pelabuhan terbesar di Indonesia yang sekaligus menjadi kawasan industri.²⁸

Oleh sebab itu penulis menganggap penulisan ini sangat penting untuk dilakukan yang dengan alasan. **Pertama**, untuk melengkapi tulisan-tulisan ilmiah yang sudah ada sebelumnya. **Kedua**, penulis ingin mengetahui bagaimana perkembangan PPS Bungus setelah menjadi sentra tuna di wilayah Indonesia bagian barat. **Ketiga**, bagaimana proses penanganan tuna untuk tujuan ekspor dari PPS Bungus dan **Keempat**, bagaimana perkembangan investasi di Bungus setelah di tetapkan sentra tuna.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus sebagai sentra tuna di wilayah

²⁷Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari dibangun sejak tahun 1984, yang diawali dengan pembebasan tanah rakyat kemudian dilanjutkan dengan tahap konstruksi atas dasar Studi Kelayakan oleh Tim Asian Development Bank bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perikanan. Sedangkan operasional PPS Kendari dimulai pada tahun 1990 setelah diresmikan oleh Presiden RI Bapak H.M.Soeharto pada tanggal 10 September 1990. Sebelum ditetapkan sebagai Pelabuhan Perikanan Samudera, status kelembagaannya adalah Project Manajemen Unit(PMU).

Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari dalam kegiatan ekonomi disekitarnya telah memberikan manfaat yang cukup tinggi seperti fasilitas produksi dan pemasaran hasil perikanan di wilayahnya, pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan untuk pelestariannya, pelayanan kesyahbandaran, mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran.

²⁸Pelabuhan Perikanan Samudera Jakarta (PPSJ) yang kini memiliki nama baru PPS Nizam Zachman merupakan salah satu dari 5 (lima) pelabuhan perikanan tipe samudera, diresmikan pada tanggal 17 Juli 1984. Semula pelabuhan perikanan ini berbentuk Project Manajemen Unit (PMU) namun seiring dengan berkembangnya kebutuhan pemakai jasa, maka pada tahun 1992 dibentuk menjadi Perusahaan Umum (Perum) Prasarana Perikanan Samudera.

Indonesia bagian barat. Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk mengangkat permasalahan ini menjadi sebuah karangan ilmiah dengan judul **“Perkembangan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Sebagai Sentra Tuna di Wilayah Indonesia Bagian Barat (2006-2015)”**.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Dari penjelasan di atas maka penelitian ini difokuskan pada Perkembangan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus sebagai Sentra Tuna di Wilayah Indonesia Bagian Barat. Batasan spasial ialah Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang berlokasi di Jl Raya Padang-Painan KM 16 Padang, Desa Labuan Kota Padang. Sementara batasan waktu (temporal), yaitu 2006-2015. Pada tahun 2006 yaitu awal ditetapkannya Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus sebagai sentra tuna di wilayah Indonesia bagian barat oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan pada tahun 2015 terjadi penurunan produksi ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.

2. Rumusan Masalah

Untuk lebih terarahnya kajian dalam tulisan ini dirumuskan dua permasalahan yaitu:

1. Bagaimana perkembangan produksi ikan tuna ekspor di PPS Bungus setelah sentra tuna di wilayah Indonesia bagian barat sejak 2006-2015?
2. Bagaimana dampak penetapan PPS Bungus sebagai sentra tuna di wilayah Indonesia bagian barat ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pembatasan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan perkembangan ekspor di PPS Bungus sebagai sentra tuna di wilayah Indonesia bagian barat sejak 2006-2015.
2. Mendeskripsikan Implementasi penetapan PPS Bungus sebagai sentra tuna di wilayah Indonesia bagian barat.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, di antaranya:

1. Secara akademis; sebagai masukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji tentang Pelabuhan Bungus.
2. Secara praktis; menambah pengetahuan penulis tentang peristiwa sejarah, khususnya sejarah maritim di wilayah Sumatera Barat.

D. Studi Pustaka

1. Studi Relevan

Kajian tentang pelabuhan ini, pernah diteliti sebelumnya baik dalam bentuk buku, jurnal, maupun (skripsi) lainnya. *Pertama* yaitu karya Aldian Syofianda dalam skripsi yang berjudul *Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (1985-2009)*. Penelitian yang dilakukan Aldian Syofianda membahas tentang dampak sosial ekonomi Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus bagi masyarakat. Sejarah sosial merupakan kajian sejarah tentang masalah yang muncul dalam kehidupan

masyarakat, yang mencoba melihat bukti-bukti sejarah dari sudut pandang mengembangkan tren sosial. Sedangkan sejarah ekonomi mempelajari manusia sebagai pencari dan pembelanja.²⁹

Hal yang membedakan skripsi penulis dengan Aldian Syofianda adalah penulis membahas tentang “Perkembangan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus setelah ditetapkan menjadi sentra tuna di daerah Indonesia bagian barat (2006-2015)”, dari segi perkembangan produksi ikan tuna ekspor dan penetapan PPS Bungus sebagai sentra tuna.

*Kedua, Suci Asrina Ikhsan dkk menulis jurnal berjudul Strategi Pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (PPS) Bungus, Padang, Sumatera Barat Ditinjau Dari Aspek Produksi. Membahas tentang strategi pengembangan PPS Bungus untuk pangsa pasar yang potensial, termasuk kawasan minapolitan.*³⁰

Ketiga, Yuspardianto menulis jurnal dengan judul Studi Fasilitas Pelabuhan Perikanan Dalam Rangka Mengembangkan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Sumatera Barat. Membahas tentang fasilitas yang ada di Pelabuhan Perikanan

²⁹ Aldian Syofianda. *Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (1985-2009). Skripsi. Fakultas Ilmu Budaya. Universitas Andalas: Padang. 2013. Hal 4*

³⁰ Suci Asrina Ikhsan dkk. ” *Strategi Pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus, Padang Sumatera Barat Ditinjau Dari Aspek Produksi*”. *Jurnal of Fisheries Resources Utilization Management and Technology*. 2015. Volume 4, Nomor 2. Hal. 70

Samudera Bungus mulai dari fasilitas pokok, fasilitas fungsional maupun fasilitas penunjang.³¹

Keempat, Rini Susanti melengkapi studi relevan dalam penelitian ini, dengan tesisnya yang berjudul *Analisa Pengembangan Perikanan Tuna Sumatera Barat*. Membahas tentang potensi perikanan tuna Sumatera Barat dan analisis aspek-aspek yang terkait dengan perkembangan perikanan tuna pada masa yang akan datang.³² Hal yang membedakan penelitian yang dilakukan penulis dengan Rini Susanti adalah penulis menekankan pada perkembangan pelabuhan Bungus sebagai sentra tuna wilayah Indonesia bagian barat.

Penulis menyadari selain karya-karya terpenting di atas, masih banyak karya-karya lain baik berupa buku skripsi atau artikel yang menyinggung berbagai aspek dari persoalan-persoalan yang terkait dengan masalah Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus. Akan tetapi penulis berkeyakinan karya-karya tersebut belumlah membahas secara khusus tentang pokok persoalan yang akan dijelaskan dalam skripsi ini, yang melihat perkembangan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus sebagai sentra tuna di wilayah Indonesia bagian barat tahun 2006-2015.

³¹ Yuspardianto. *Studi Fasilitas Pelabuhan Perikanan dalam Rangka Pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Sumatera Barat*. Jurnal Mangrove dan Pesisir. 2006. Vol VI Nomor 1. Hal. 47

³² Rini Sunsanti. *Op.Cit.* Hal. 4

2. Konseptual

A. Pelabuhan

Secara harfiah pelabuhan merupakan tempat berlabuhnya kapal-kapal untuk berbagai kepentingan seperti menghindar dari bahaya alam, beristirahat, atau untuk kepentingan aktivitas perdagangan, dan kepentingan lainnya. Dari segi ekonomi pelabuhan merupakan tempat bertemunya pelaut dan pedagang dari seberang dengan pelaut dan pedagang setempat.³³

Adapun beberapa definisi pelabuhan menurut beberapa ahli, yakni:

1. C. Verlaque (1975)

Pelabuhan laut adalah suatu tempat berlangsungnya kontak penting antara transportasi melalui laut dengan transportasi melalui darat (baik dengan menggunakan mobil maupun kereta api).

2. A. Vingarie (1979)

Pelabuhan adalah suatu wilayah yang merupakan terjadinya kontak antara dua bidang sirkulasi transportasi berbeda yaitu sirkulasi transportasi maritim dimana peranan pelabuhan adalah untuk menjamin kelanjutan dari skema transportasi yang berhubungan dengan dua bidang tersebut.

3. Departemen Perhubungan 1893

Pelabuhan adalah suatu daerah untuk berlabuh dan atau bertambatnya kapal laut serta kendaraan lainnya untuk menaikkan dan menurunkan penumpang, bongkar muat barang-barang yang semuanya merupakan daerah lingkungan kerja aktivitas

³³ Singgih Tri Sulistiyono. 2004. *Pengantar Sejarah Maritim Indonesia*. Jakarta : Dikti Hal.120

ekonomi di mana secara yuridis terdapat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan untuk kegiatan-kegiatan di pelabuhan tersebut.³⁴

Pelabuhan dapat dibagi dalam beberapa kategori menurut fungsinya, antara lain pelabuhan minyak, pelabuhan perikanan, pelabuhan barang, pelabuhan penumpang, pelabuhan militer dan pelabuhan campuran. Dalam pembahasan ini penulis akan fokus untuk membahas tentang pelabuhan perikanan saja.

a. Pelabuhan Perikanan

Sektor perikanan dan kelautan memerlukan fasilitas pendaratan ikan atau pelabuhan yang khusus melayani aktivitas industri dan perdagangan ikan atau yang disebut dengan pelabuhan perikanan. Pelabuhan perikanan adalah pelabuhan khusus pusat pengembangan ekonomi perikanan, baik dilihat dari aspek produksi maupun pemasarannya.³⁵

Menurut Direktorat Jenderal Perikanan Departemen Pertanian RI (1981), pelabuhan perikanan adalah pelabuhan yang secara khusus menampung kegiatan masyarakat perikanan baik dilihat dari aspek produksi, pengolahan maupun pemasarannya.

Sementara menurut Departemen Pertanian dan Departemen Perhubungan (1996) pelabuhan perikanan adalah sebagai tempat pelayanan umum bagi masyarakat nelayan dan usaha perikanan, sebagai pusat pembinaan dan peningkatan kegiatan

³⁴ Ernani Lubis. PPT *.Pelabuhan*. Bagian Kepelabuhan Perikanan dan Kebijakan Pengelolaan (KKP).

³⁵ Sulistyani Dyah.2005. *Modul Untuk Pengembangan Mata Kuliyah Manajemen Pelabuhan Perikanan*. Semarang : UNDIP Hal. 2

ekonomi perikanan yang dilengkapi dengan fasilitas di darat dan di perairan sekitarnya untuk digunakan sebagai pangkalan operasional tempat berlabuh, bertambat, mendaratkan hasil, penanganan, pengolahan, distribusi dan pemasaran hasil perikanan.

b. Klasifikasi Pelabuhan Perikanan

Klasifikasi pelabuhan perikanan berdasarkan Permen No.16 /Men/2006 tentang pelabuhan perikanan, yaitu:

1. Pelabuhan Perikanan Tipe A (Pelabuhan Perikanan Samudera).

Pelabuhan perikanan tipe ini adalah pelabuhan perikanan yang diperuntukkan terutama bagi kapal-kapal perikanan yang beroperasi di perairan samudera yang lazim digolongkan ke dalam armada perikanan jarak jauh sampai ke perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan perairan Internasional, mempunyai perlengkapan untuk menangani (*handling*) dan mengolah sumber daya ikan sesuai dengan kapasitasnya yaitu jumlah hasil ikan yang didaratkan.

Adapun jumlah ikan yang didaratkan minimum sebanyak 200 ton/hari atau 73.000 ton/tahun baik untuk pemasaran di dalam maupun di luar negeri (*ekspor*). Pelabuhan perikanan tipe A ini dirancang untuk bisa menampung kapal berukuran lebih besar daripada 60 GT (*Gross Tonnage*) sebanyak sampai dengan 100 unit kapal sekaligus. Mempunyai cadangan lahan untuk pengembangan seluas 30 Ha. Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus termasuk pada kategori pelabuhan perikanan tipe ini.

2. Pelabuhan Perikanan Tipe B (Pelabuhan Perikanan Nusantara)

Pelabuhan perikanan tipe ini adalah pelabuhan perikanan yang diperuntukkan terutama bagi kapal-kapal perikanan yang beroperasi di perairan nusantara yang lazim digolongkan ke dalam armada perikanan jarak sedang ke perairan ZEEI, mempunyai perlengkapan untuk menangani dan atau mengolah ikan sesuai dengan kapasitasnya yaitu jumlah ikan yang didaratkan.

Adapun jumlah ikan yang didaratkan minimum sebanyak 50 ton/hari atau 18.250 ton/tahun untuk pemasaran di dalam negeri. Pelabuhan perikanan tipe B ini dirancang untuk bisa menampung kapal berukuran sampai dengan 60 GT (*Gross Tonage*) sebanyak sampai dengan 50 unit kapal sekaligus. Mempunyai cadangan lahan untuk pengembangan seluas 10 Ha.

3. Pelabuhan Perikan Tipe C (Pelabuhan Perikanan Pantai)

Pelabuhan tipe ini adalah pelabuhan perikanan yang diperuntukkan terutama bagi kapal-kapal perikanan yang beroperasi di perairan pantai, mempunyai perlengkapan untuk menangani dan atau mengolah ikan sesuai dengan kapasitasnya yaitu minimum sebanyak 20 ton/hari atau 7.300 ton/tahun untuk pemasaran di daerah sekitarnya atau dikumpulkan dan dikirim ke pelabuhan perikanan yang lebih besar. Pelabuhan perikanan tipe C ini dirancang untuk bisa menampung kapal-kapal berukuran sampai dengan 15 GT (*Gross Tonage*) sebanyak sampai dengan 25 unit kapal sekaligus. Mempunyai cadangan lahan untuk pengembangan seluas 5 Ha.

4. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) adalah pelabuhan perikanan yang dibangun di atas lahan sekurang-kurangnya 2 Ha, jumlah kapal yang dilayani lebih dari 20

unit/hari, atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 60 GT, dilengkapi dengan fasilitas tambat labuh untuk kapal minimal 3 GT, panjang dermaga minimal 50 m dengan kedalaman minus 2 m.³⁶

5. Sentra Tuna

1. Sentra

Sentra adalah unit kecil kawasan yang memiliki ciri tertentu dimana didalamnya terdapat kegiatan proses produksi dan merupakan area yang lebih khusus untuk suatu komoditi kegiatan ekonomi yang ditunjang oleh sarana untuk berkembangnya produk atau jasa yang terdiri dari sekumpulan pengusaha mikro, kecil dan menengah.

Di area sentra tersebut terdapat kesatuan fungsional secara fisik: lahan, geografis, infrastruktur, kelembagaan dan sumber daya manusia, yang berpotensi untuk berkembangnya kegiatan ekonomi di bawah pengaruh pasar dari suatu produk yang mempunyai nilai jual dan daya saing tinggi.

Berdasarkan SK Menteri Negara Koperasi dan UKM No: 32/ Kep / M. KUKM/ IV/ 2002, tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Sentra. Sentra didefinisikan sebagai pusat kegiatan di kawasan atau lokasi tertentu dimana terdapat usaha yang menggunakan bahan atau sarana yang sama, menghasilkan produk yang sama atau sejenis serta memiliki prospek untuk dikembangkan menjadi klaster.³⁷

³⁶ Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan. No. PER. 16 /MEN/2006 Tentang Pelabuhan Perikanan. Diakses pada tanggal 10 Desember 2015. Pukul:10.56

³⁷ <http://abstraksiekonomi.blogspot.co.id/2014/01/pengertian-sentra-industri.html>. Diakses pada tanggal 12 Februari 2016 Pukul 09.00.

2. Perikanan Tuna

Ikan tuna (*Thunnus*) di Indonesia terdiri atas beberapa jenis yaitu madidihang (*Thunnus albacares*), albacore (*Thunnus alalunga*), mata besar (*Thunnus obesus*), dan tatihi (*Thunnus maccoyi*). Ikan-ikan tuna ini mempunyai bentuk seperti torpedo dengan kepala yang lancip. Tubuhnya licin, sirip dada melengkung, dan sirip ekor bercagak dengan celah yang lebar. Di belakang sirip punggung dan sirip dubur terdapat sirip-sirip tambahan yang kecil-kecil dan terpisah-pisah. Sirip-sirip punggung, dubur, perut dan dada pada pangkalnya mempunyai lekukan pada tubuh. Sirip-sirip tersebut dapat dilipat masuk kedalam lekukan itu, sehingga dapat memperkecil daya gesekan air pada saat ikan itu berenang dengan kecepatan penuh. Ikan tuna memang terkenal sebagai perenang-perenang yang hebat, bisa mencapai kecepatan sekitar 50 meter/jam. Umumnya ikan-ikan tuna ini hidup dengan mengarungi samudera-samudera besar di dunia.

a. Madidihang atau *yellowfin* tuna (*thunnus albacares*).

Termasuk tuna yang mempunyai ukuran besar, bisa mencapai ukuran lebih dari 2 meter. Madidihang hidup di perairan yang bersuhu 17-31° C, dengan suhu optimal berkisaran 19-23°.

b. Tuna albakor (*Thunnus alalunga*).

Mempunyai ukuran dewasa sekitar 0,9 m. Kondisi suhu perairan juga berperan dalam penyebarannya. Albakor yang berukuran kecil senang dengan perairan yang bersuhu rendah sedangkan ikan-ikan besar berada di perairan yang lebih hangat. Di Indonesia penangkapan albakor banyak dilakukan di Samudera Hindia.

c. Tuna mata besar atau *bigeye* tuna (*thunnus obesus*).

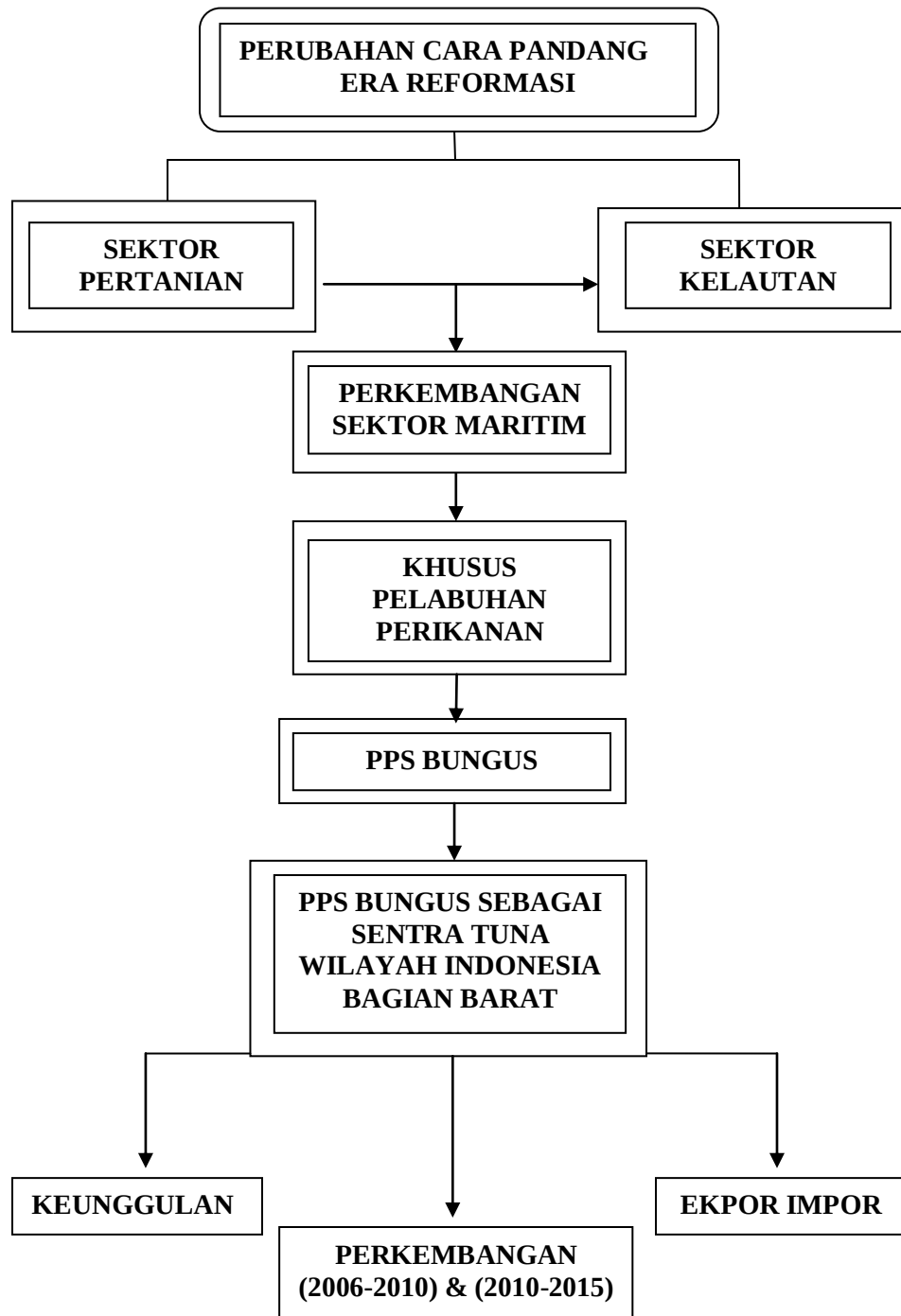
Mempunyai panjang 2,30 m dan berat sampai 150 kg. Ia mulai dewasa pada ukuran 0,9-1 m dan dapat mengandung telur sebanyak 2,8-3,6 juta butir. Sebaran ikan ini bersinambung dari Samudera Pasifik melalui perairan di antara pulau-pulau Indonesia ke Samudra Hindia. Di Indonesia ikan ini banyak ditangkap di perairan sebelah selatan Jawa, sebelah barat daya Sumatera Selatan, Bali dan Nusa Tenggara serta Laut Banda dan Maluku.

d. Tatihu (*Thunnus maccoyi*).

Hanya hidup di belahan bumi selatan. Jenis ikan ini hidup di tiga samudera, mulai dari lepas pantai Argentina, meluas ke Samudera Atlantik, Samudera Hindia, lepas pantai selatan Australia dan berakhir di perairan Chili.³⁸

³⁸ Anugerah Nontji.1993.*Laut Nusantara*: Penerbit Djembatan Hal. 293-296

E. Kerangka Pemikiran



F. Metode Penelitian

Metodologi sebagai ilmu tentang metode tidak dapat dipelajari tanpa mengangkat masalah kerangka teoritis dan konseptual karena pendekatan sebagai pokok metodologi hanya dapat dioperasionalisasikan dengan seperangkat teori dan konsep.³⁹

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sejarah. Metode sejarah dapat diartikan sebagai proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lalu. Metode penelitian sejarah ini terdiri dari empat tahapan, yakni heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi.⁴⁰ Tahap pertama, heuristik, yaitu proses mencari dan mengumpulkan data berupa sumber tertulis dan sumber lisan yang relevan dengan topik penelitian ini. Sumber tertulis diperoleh dari arsip, surat kabar dan buku. Sedangkan sumber lisan diperoleh melalui melakukan wawancara dengan 10 orang informan dengan kategori pimpinan sampai staf.⁴¹

Sumber tertulis tentang Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus peneliti dapat kan dengan mengunjungi Kantor Administrasi PPB Bungus dan melalui berbagai kepustakaan yang penulis lakukan di beberapa tempat seperti perpustakaan Labor Jurusan Sejarah Universitas Negeri Padang (UNP), Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial UNP, Perpustakaan Pusat UNP, Perpustakaan PKSBE UNP, Perpustakaan

³⁹ Sartono Kartodirjo. 1993. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama Hal. 3

⁴⁰ Louis Gottschalk. 1987. *Mengerti Sejarah*. Jakarta: Bina Aksara. Hal. 32

⁴¹ Syamsudin Heliuss. 2012. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak. Hal. 83

Pasca Sarjana UNP, Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Unand, Perpustakaan PPS Bungus dan Perpustakaan Wilayah Sumatera Barat.

Studi kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data tertulis, membaca, mencatat dan mengolah bahan penelitian.⁴²

Tahapan kedua, kritik sumber, yaitu Tahap kedua, kritik sumber, terdiri dari dua jenis yaitu kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal digunakan untuk menguji keaslian sumber sedangkan kritik internal digunakan kebenaran sumber. Kedua jenis kritik ini dilakukan terhadap berbagai sumber yang ada untuk memperoleh sumber-sumber yang layak untuk dipergunakan.

Tahap ketiga, interpretasi, yaitu menganalisis dan menghubungkan fakta-fakta yang telah diolah melalui kritik sumber. Tahap keempat, historiografi atau penulisan sejarah seluruh data yang ada ditulis berdasarkan struktur isi.

Perlu ditekankan di sini bahwa setiap penulisan sejarah merupakan konstruk (bangunan) yang pada hakikatnya bersifat subjektif dalam arti bahwa gambaran sejarah itu melekat pada faktor atau unsur pribadi, ialah subjek. Penulis perlu menyadari bahwa bahwa dia senantiasa menghadapi masalah subjektivitas yang mengancam akan menyelinap di dalam karyanya.⁴³

⁴² Mestika Zed. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*: Jakarta : Obor Hal. 1-3

⁴³ Sartono Kartodirjo *Op. Cit*, Hal. 225